

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

4.1 Penjelasan mengenai nilai rata-rata capaian kinerja dan kategorinya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Capaian indikator sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA) dengan Indikator Kinerjanya Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) capaian indikatornya terealisasi sebesar 118,32 persen yaitu dengan Nilai Investasi Daerah sebesar Rp. 295.801.400.000,- dari target sebesar Rp. 250.000.000.000,- data ini bersumber dari hasil rilis BKPM berdasarkan laporan capaian realisasi investasi tahun 2020 yang pelaporannya dilakukan oleh pelaku usaha/investor. Namun Nilai investasi Daerah ini menurun dibanding tahun 2020, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia yang sangat berdampak terhadap perkembangan perekonomian/kegiatan usaha di Indonesia termasuk di Kabupaten Barito Kuala dan dengan adanya pengurangan anggaran pada tahun 2020 oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga target Nilai Investasi Daerah tahun 2020 diturunkan. Berdasarkan evaluasi dan monitoring serta pembinaan terhadap perusahaan/investor bahwa terjadinya peningkatan Nilai Investasi Daerah pada tahun 2020 ini antara lain adanya sebagian pelaku usaha/investor yang melaporkan nilai investasi

usahanya namun kesadaran pelaku usaha/investor untuk melaporkan capaian realisasi investasinya secara kontinyu masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan dan pembinaan. Disisi lain berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung meningkatnya investasi di daerah tetap dilaksanakan dan dapat dilihat dari Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata 100 persen sebagaimana berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan:

- Perencanaan dan Pengembangan PM dengan realisasi fisik 100 persen
- Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM dengan realisasi fisik 100 persen
- Penyelenggaraan Pameran Investasi/Promosi Daerah dengan realisasi fisik 100 persen
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi fisik 100 persen

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan:

- Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan PM dengan realisasi fisik 100 persen

Capaian indikator sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikatornya yaitu Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dengan realisasi 100,30 persen yaitu realisasi nilai indeks sebesar 85 dari nilai target 84,75 hal ini di dukung oleh :

Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

- Pendataan Perizinan dengan realisasi fisik sebesar 100 persen
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi fisik sebesar 100 persen
- Monitoring dan Evaluasi Perizinan dengan realisasi fisik sebesar 100 persen
- Sosialisasi Perizinan dengan realisasi fisik sebesar 100 persen
- Pemeriksaan dan Pengecekan Lapangan Pemohon Perizinan dengan realisasi fisik sebesar 100 persen

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala, DPA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.058.053.787,-, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.972.956.997,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,22%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dengan kondisi Silpa sebesar Rp. 85.096.790,-.

4.2 Hambatan dan Saran Perbaikan

Adapun hambatan atau kendala utama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kinerja agar dapat **lebih optimal** dan maksimal adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya Pelaku Usaha yang belum melaporkan Capaian Realisasi Investasinya secara jujur/terbuka
- b. Pelaku usaha tidak secara kontinue dan konsisten dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atau Laporan Capaian Realisasi Investasi
- c. Masih terdapat kesalahan dalam pelaporan kegiatan Penanaman Modal atau Laporan Realisasi Investasi oleh Pelaku Usaha/Investor
- d. Masih ada perusahaan/investor yang belum termonitor dan dibina karena terbatasnya sumber daya manusia dan penganggaran kegiatan.
- e. Khusus untuk peningkatan kualitas pelayanan, unsur waktu penyelesaian penerbitan perizinan tertentu yang masih terkesan lambat berdasarkan hasil survey IKM, namun sebenarnya untuk penanganan/pengelolaan di Dinas PM dan PTSP jangka waktu proses perizinan sudah sesuai Standar Pelayanan dan SOP, namun karena beberapa izin harus ada rekomendasi dari SKPD teknis terkait baik berupa survey lokasi, persyaratan teknis maupun persyaratan pembuatan dokumen lainnya oleh SKPD Teknis lainnya sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.

- f. Beberapa kegiatan yang mengumpulkan orang banyak pada pandemi ini tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu alternatif lain agar kegiatan tetap berjalan dan memenuhi sasaran.

Untuk saran perbaikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan monitoring, evaluasi terhadap pelaku usaha lebih ditingkatkan dalam hal volume/frekuensi dan luasan cakupan perusahaan yang dimonitoring dengan pengaturan SDM yang tersedia agar lebih efektif dan pengalokasian anggaran kepada kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya sasaran kinerja utama, dengan demikian pelaku usaha/investor akan dengan sadar melaksanakan pelaporan kegiatan penanaman modal/investasi usahanya secara rutin, benar, jujur dan lengkap
- b. Perlunya pembinaan terhadap pelaku usaha melalui bimbingan teknis pelaporan dan sosialisasi peraturan perundangan terkait penanaman modal dan perizinannya.
- c. Perlunya sosialisasi atau pemberian informasi dan pemahaman kepada pengguna jasa perizinan terkait prosedur dan standar pelayanan (waktu proses perizinan) terutama sehubungan dengan proses pada instansi teknis terkait dan pendampingan dalam pemanfaatan aplikasi OSS.
- d. Koordinasi antar SKPD terkait perlu dibenahi dan perlu komitmen bersama agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan waktu yang lebih cepat

- e. SOP pelayanan perlu selalu di reviu/dievaluasi dalam rangka untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
- f. Agar berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak tetap dapat dilaksanakan harus memperhatikan protokol kesehatan dan atau dengan metode alternatif.

Marabahan, Pebruari 2021

Kepala Dinas PMPTSP

Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP

NIP 19631127 199203 1 006